Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)
Volume 3, Oktober 2026
The article is published with Open Access at: https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/konmaspi

Diponegoro dalam Banyak Wajah: Kontestasi Narasi Tentang Ratu Adil, Pejuang, dan Pemberontak Jawa

Irma Rifatul Jamil
UIN Sunan Ampel Surabaya
irmarifatul.j@gmail.com
Imam Ibnu Hajar
UIN Sunan Ampel Surabaya
ibnuhajar@uinsa.ac.id

Abstrak: Historiografi Perang Jawa (1825-1830) menempatkan Pangeran Diponegoro sebagai tokoh yang sarat dengan beragam pemaknaan. Keragaman ini muncul akibat perbedaan sumber dan sudut pandang historiografis yang digunakan. Diponegoro pun tampil dalam berbagai bentuk narasi, mulai dari Ratu Adil, pejuang, hingga pemberontak. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini disusun dengan tiga tujuan utama. Pertama, menganalisis konstruksi narasi Diponegoro sebagai Ratu Adil dalam sumber Jawa. Kedua, mengkaji representasinya sebagai pejuang dalam narasi Perang Jawa sekaligus sebagai pemberontak dalam perspektif kolonial Belanda. Ketiga, menjelaskan faktor penyebab munculnya perbedaan narasi tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian sejarah dengan pendekatan kualitatif-historiografis melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Analisis dilakukan dengan memanfaatkan konsep narasi historiografis Hayden White dan teori representasi Stuart Hall. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Diponegoro dikonstruksi sebagai figur yang memiliki legitimasi spiritual dan terkait dengan gagasan Ratu Adil, direpresentasikan sebagai pejuang dalam narasi perlawanan terhadap kolonialisme, serta ditempatkan sebagai pemberontak dalam perspektif kolonial Belanda. Perbedaan tersebut mencerminkan adanya konsistensi narasi yang membentuk beragam representasi Diponegoro dalam historiografi Perang Jawa.

Kata Kunci: *Perang Jawa, Diponegoro, Ratu Adil, Pejuang, dan Pemberontak.*

PENDAHULUAN

Perang Jawa yang berlangsung pada 1825-1830 merupakan salah satu bentuk perlawanan terbesar terhadap kekuasaan kolonial Belanda di tanah Jawa. Pangeran Diponegoro dikenal luas sebagai tokoh utama di balik perlawanan tersebut. Namun, akar konflik ini tidak berdiri sendiri. Selain melibatkan ketegangan politik antara Diponegoro dengan otoritas kolonial, pecahnya perang juga tidak lepas dari persoalan-persoalan yang terjadi di lingkup internal Kesultanan Yogyakarta, ditambah kondisi

sosial masyarakat Jawa yang kian tertekan. Ketegangan tersebut kemudian diperparah oleh campur tangan pihak Belanda dalam tata kelola internal keraton serta serangkaian kebijakan kolonial yang diberlakukan, sehingga akhirnya memuncak menjadi Perang Jawa (Novitri, 2025). Kompleksitas ini kemudian berimbas pada cara Diponegoro dipahami dalam historiografi. Tidak ada satu pemaknaan tunggal yang berlaku terhadap sosoknya. Setiap sumber dan perspektif menghasilkan konstruksi narasi sendiri. Sumber Jawa memaknai Diponegoro sebagai Ratu Adil, narasi Perang Jawa menampilkannya sebagai pejuang, sedangkan perspektif kolonial Belanda justru memposisikannya sebagai pemberontak.

Tradisi dan sumber Jawa memaknai Diponegoro melalui gagasan Ratu Adil. Sosok ini digambarkan sebagai figur yang diharapkan hadir untuk mengakhiri penderitaan dan krisis yang dialami masyarakat. Mitos tersebut telah lama berakar dalam alam pikiran masyarakat Jawa, sebagai wujud harapan terhadap kehadiran pemimpin yang mampu membawa perubahan dari situasi penuh ketidakadilan (Agustin, 2009). Gambaran serupa juga muncul dalam Babad Diponegoro. Naskah ini mempresentasikan Diponegoro tidak hanya sebagai Ratu Adil, tetapi juga sebagai pemimpin religius dengan legitimasi moral dan spiritual (Claria, 2026). Representasi ini menunjukkan bahwa Diponegoro dipahami secara lebih luas, tidak sebatas melalui peran politik dan militernya, tetapi juga melalui dimensi keagamaan dan harapan sosial yang menyertainya.

Perlawanan terhadap intervensi dan kekuasaan kolonial Belanda di Jawa menjadi fondasi utama citra Diponegoro sebagai pejuang. Kedudukannya sebagai tokoh sentral dalam gerakan perlawanan tersebut tergambar jelas dalam Perang Jawa, sebuah gerakan yang merentang dari persoalan politik hingga menyentuh dimensi sosial dan keagamaan (Novitri, 2025). Kompleksitas identitas Diponegoro semakin tampak ketika ditelaah melalui historiografi Peter Carey, yang menempatkannya sekaligus sebagai bangsawan Jawa, figur yang lekat dengan kehidupan masyarakat pedesaan dan nilai-nilai keislaman, sekaligus penentang campur tangan kolonial dalam persoalan internal Keraton Yogyakarta (Nafida, 2026). Konstruksi Diponegoro sebagai pejuang, dengan demikian, tidak lahir begitu saja, melainkan terbentuk melalui narasi yang secara konsisten menempatkan setiap tindakannya sebagai wujud perlawanan terhadap perubahan politik dan penjajahan kolonial.

Berbeda halnya dengan perspektif kolonial Belanda, tindakan Diponegoro

beserta para pengikutnya justru ditempatkan dalam kerangka pemberontakan terhadap kekuasaan yang berlaku. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa pemaknaan terhadap seorang tokoh sejarah sangat bergantung pada posisi penulis serta konteks historiografi yang dipakai. Narasi yang memberikan legitimasi terhadap perjuangan Diponegoro cenderung menghasilkan representasi sebagai pejuang, sementara narasi yang bertolak dari kepentingan kekuasaan kolonial cenderung menghasilkan representasi sebagai pemberontak. Perbedaan pemaknaan ini penting untuk dikaji karena mengungkap adanya kontestasi narasi dalam historiografi Perang Jawa.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengangkat sosok Diponegoro dari sudut pandang yang berbeda-beda. Agustin berfokus pada keterkaitan mitos Ratu Adil dengan pecahnya Perang Jawa (Agustin, 2009). Claria menelusuri Babad Diponegoro dan menemukan bahwa Diponegoro direpresentasikan sebagai Ratu Adil, pemimpin religius, sekaligus tokoh bermoral (Claria, 2026). Sementara itu, identitas, dimensi politik, dan keagamaan Diponegoro dalam karya Peter Carey menjadi perhatian utama Nafida (Nafida, 2026).

Adapun peran Diponegoro dalam melawan kolonialisme Belanda dikupas oleh Novitri melalui kajiannya atas Perang Jawa (Novitri, 2025). Persoalannya, keempat penelitian ini berjalan sendiri-sendiri. Belum ada upaya untuk mempertemukan ketiga konstruksi tersebut, yakni sumber Jawa, Peter Carey, dan historiografi kolonial Belanda, dalam satu analisis historiografi yang komprehensif. Kesenjangan itulah yang berupaya dijawab melalui penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan konsep narasi historiografis dari Hayden White serta teori representasi Stuart Hall untuk menganalisis perbedaan tersebut. Menurut White, narasi sejarah tidak semata berkaitan dengan fakta yang disampaikan, melainkan juga dengan bagaimana fakta itu disusun dan diberi bentuk naratif, sehingga melahirkan pemaknaan tertentu terhadap peristiwa maupun tokoh sejarah (White, 2000). Sementara itu, Hall memandang representasi sebagai proses produksi dan pertukaran makna melalui bahasa dan praktik kebudayaan, sehingga seorang tokoh tidak sekadar "digambarkan", tetapi juga dibentuk maknanya melalui sistem representasi tertentu (Hall, 1997). Dengan demikian, konsep White dipakai untuk melihat proses konstruksi narasi tentang Diponegoro, sementara teori Hall digunakan untuk menganalisis

representasi yang lahir dari konstruksi tersebut.

Metode penelitian sejarah dengan pendekatan kualitatif-historiografis digunakan dalam penelitian ini, melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Hajar dkk., 2026). Sumber utama yang digunakan meliputi Babad Diponegoro, karya Peter Carey berjudul *Kuasa Ramalan: Pangeran Dipanegara dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785–1855*, serta karya P. J. F. Louw dan E. S. de Klerck berjudul *De Java-Oorlog van 1825–1830*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi narasi Diponegoro sebagai Ratu Adil dalam sumber Jawa, representasinya sebagai pejuang dalam narasi Perang Jawa, serta sebagai pemberontak dalam perspektif kolonial Belanda, sekaligus menjelaskan sebab munculnya perbedaan narasi tersebut dalam historiografi Perang Jawa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Narasi Diponegoro sebagai Ratu Adil dalam Sumber Jawa

Harapan akan hadirnya seorang pemimpin ideal menjadi inti dari konsep Ratu Adil dalam tradisi Jawa. Pemimpin semacam ini dinantikan kehadirannya terutama ketika tatanan sosial mengalami keruntuhan, karena diyakini mampu membawa kehidupan masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Sosok Ratu Adil sendiri tidak dapat direduksi sekadar sebagai raja yang memerintah secara adil. Ia juga diyakini memiliki kekuatan moral, spiritual, dan supranatural, serta terhubung secara khusus dengan Tuhan. Berangkat dari pemahaman tersebut, Ratu Adil lazim digambarkan melalui sejumlah sifat, yaitu taat beragama, bijaksana, sabar, tidak berorientasi pada kepentingan duniawi, dan mampu membebaskan masyarakat dari situasi sulit yang mereka hadapi (Fatkhan, 2020).

Ramalan Jayabaya menjadi salah satu akar penting dari gagasan Ratu Adil dalam tradisi Jawa. Melalui ramalan ini, digambarkan rangkaian perubahan zaman yang pada akhirnya membawa masyarakat menuju kondisi yang lebih baik. Fase sebelum kemunculan Ratu Adil dikenal sebagai zaman edan, yaitu masa kekacauan ketika kepentingan pribadi dan angkara murka mendominasi kehidupan masyarakat. Fase ini kemudian digantikan oleh masa yang lebih baik, yang ditandai dengan kehadiran tokoh penyelamat bernama Ratu Adil atau Herucakra (Fatkhan, 2020). Seiring berjalannya waktu, gagasan tentang zaman edan dan Ratu Adil terus berkembang melalui beragam penafsiran atas ramalan Jayabaya. Ramalan ini pun tidak lagi sekadar dimaknai sebagai

cerita tentang masa depan. Ia juga berfungsi sebagai salah satu cara masyarakat Jawa memahami krisis, pergeseran kekuasaan, dan harapan terhadap terwujudnya tatanan yang lebih adil (Wijaya dkk., 2025).

Anggapan bahwa berasal langsung dari Prabu Jayabaya perlu dikaji ulang. Pada kenyataannya, Jangka Jayabaya hadir dalam berbagai bentuk yang beredar di masyarakat, hasil dari proses penulisan dan penggubahan oleh sejumlah pujangga pada periode yang berlainan. Proses penafsiran terhadap teks-teks tersebut pun terus berlangsung, menyesuaikan dengan konteks zaman masing-masing. Meski demikian, nama Jayabaya tetap melekat pada berbagai ramalan yang beredar, sekalipun riwayat penyusunan teksnya berbeda-beda (Fatkhan, 2020).

Tradisi ramalan Jawa pada perkembangannya tidak lagi berdiri sendiri, melainkan bertemu dengan lingkungan pesantren dan tradisi Islam. Pertemuan ini tercermin dari penulisan ulang serta penafsiran kembali sejumlah teks, seperti *Jangka Jayabaya, Serat Akhirin Jaman*, dan *Serat Jayabaya* atau *Pralambang Jayabaya*, dalam konteks pesantren. Makna Ratu Adil pun mengalami perluasan dalam penafsiran tersebut. Sosok ini tidak hanya terkait dengan kedaulatan Jawa, tetapi juga dikaitkan dengan kedatangan seorang dari Mekah, semangat persatuan, pembalikan tatanan kolonial, pengusiran Belanda melalui perang sabil, serta terciptanya kehidupan yang berpijak pada kemaslahatan. Berkat masuknya unsur-unsur keislaman tersebut, harapan terhadap Ratu Adil pun bertransformasi menjadi lebih dekat dengan bahasa dan pengalaman keagamaan masyarakat Muslim Jawa (Baso, 2016).

Nuansa keagamaan turut mewarnai perjalanan hidup Diponegoro. Semenjak tinggal di Tegalrejo, kedekatannya dengan kehidupan agama tergambar jelas, begitu pula pendidikan yang ia terima. Pendidikan tersebut tidak terbatas pada pengetahuan Islam semata, tetapi juga mencakup warisan kebudayaan Jawa. Berbagai tempat ia kunjungi, mulai dari masjid, pesantren, hingga tempat-tempat pertapaan dan lokasi-lokasi yang memiliki kedudukan penting dalam tradisi spiritual Jawa. Kedekatannya dengan masyarakat juga tergambar dari kebiasaannya mendatangi Pasar Gede, Imogiri, Gua Langse, dan Selarong, serta membantu para petani dalam kegiatan pertanian (Baso, 2016). Gambaran serupa juga muncul dalam Babad Diponegoro, yang merekam aktivitas keagamaan dan perjalanan Diponegoro ke masjid, pesantren, bukit, dan gua. Dalam menjalani kehidupan spiritual tersebut, ia bahkan dikenal menggunakan nama Seh Abdurrakhim (Pradipta, 1981).

Semakin jauh kisah perjalanan hidup Diponegoro bergulir, semakin banyak pula pengalaman spiritual yang menyertainya. Salah satunya terjadi di sebuah gua pada tengah malam, ketika ia dikisahkan berjumpa dengan Sunan Kalijaga yang hadir dalam cahaya bulan. Pertemuan ini membawa pesan penting, yaitu kelak Diponegoro akan menjadi raja. Pengalaman spiritual lain terjadi di Gua Langse. Di tempat ini, ia menjalani pertapaan selama kurang lebih setengah bulan dan mengalami perjumpaan dengan Kanjeng Ratu Kidul yang muncul dalam bentuk cahaya terang. Perjalanannya kemudian berlanjut ke Parangkusuma, tempat ia mendengar suara yang memerintahkannya mengganti nama dari Seh Ngabdurrakhim menjadi Ngabdulkamid. Suara tersebut turut memberi peringatan bahwa dalam tiga tahun ke depan, pemerintahan Yogyakarta akan runtuh dan Tanah Jawa akan mengalami kehancuran. Sebagai penanda dari peristiwa ini, Diponegoro menerima senjata bernama Sarotama (Pradipta, 1981).

Sarotama dalam kisah tersebut bukan sekedar senjata biasa. Nama ini merujuk pada senjata Arjuna dalam tradisi wayang. Kemiripan pun tampak jelas antara pengalaman Diponegoro menerima senjata melalui cahaya setelah mendapat wangsit dari Sunan Kalijaga dengan kisah Arjuna yang menerima senjatanya lewat kekuatan ilahi. Kehadiran tradisi wayang dalam kisah ini bukan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan menyatu dengan kehidupan keagamaan Diponegoro. Sejumlah karya sastra Jawa ia baca dan pahami, sedangkan kisah-kisah wayang berfungsi sebagai salah satu sarana untuk memahami keterkaitan antara kehidupan manusia, kekuasaan, dan kehendak Tuhan (Carey, 2017).

Kejelasan hubungan antara Diponegoro dan Ratu Adil tergambar kuat dalam peristiwa yang terjadi di Gua Secang. Tepatnya pada tanggal 21 Ramadan tahun Dal, Diponegoro yang tengah bertafakur didatangi seseorang yang mengaku sebagai utusan Ratu Adil. Utusan tersebut mengarahkannya menuju puncak gunung di sebelah tenggara. Begitu sampai di lokasi yang dituju, sosok pengantar itu lenyap, digantikan oleh kemunculan Ratu Adil dalam balutan cahaya yang sangat terang. Sosok ini tampak mengenakan surban hijau, jubah dan celana putih, serta kain merah. Pesan yang disampaikan kepada Diponegoro menegaskan bahwa dialah yang akan mendapatkan lakon di Tanah Jawa. Namun, ketika Diponegoro mengungkapkan keraguannya untuk menjalankan perang, jawaban yang ia terima justru mengarah pada kehendak Tuhan. Landasan dari tugas tersebut tersirat jelas dalam ungkapan, “Surahku adalah Kur’an” (Pradipta, 1981).

Kisah *wali wudhar* dalam Babad Diponegoro ternyata tidak terlepas dari pertemuan tersebut. Mimpi yang dialami Ratu Ageng menjadi awal mula kisah ini, yaitu tentang sosok *wali wudhar* yang harus ditemukan agar Tanah Jawa tidak jatuh ke dalam kehancuran. *Wali wudhar* sendiri dimaknai sebagai sosok yang memegang kedudukan ganda, baik dalam ranah spiritual maupun ranah duniawi. Dua tokoh sejarah, Sunan Giri dan Sultan Agung, menjadi contoh konkret dari figur yang mampu menjalankan kedua peran tersebut secara bersamaan. Penjelasan inilah yang kemudian mendorong Diponegoro untuk menghubungkan posisinya dengan pertemuannya bersama Ratu Adil, sekaligus dengan tugas memimpin prajurit Ratu Adil berdasarkan Al-Qur'an (Carey, 2017).

Unsur Islam dalam gambaran Ratu Adil tersebut berjalan berdampingan dengan tradisi kepemimpinan Jawa. Kehidupan Diponegoro sebagai seorang santri tidak membuat unsur-unsur tradisi Jawa lenyap dari kisahnya. Praktik tirakat, pertapaan, perjalanan ke tempat-tempat keramat, kisah wayang, serta hubungan dengan tokoh-tokoh spiritual Jawa tetap hadir dalam sumber-sumber mengenai dirinya. Pada saat bersamaan, perang yang dijalankannya juga dikaitkan dengan gagasan perang sabil dan cita-cita menegakkan kehidupan Islam. Konsepsi mengenai Ratu Paneteg Panatagama juga ditempatkan dalam hubungan dengan para wali dan Sultan Agung sebagai figur yang dianggap menjalankan kekuasaan duniawi sekaligus kehidupan keagamaan (Carey, 2017).

Hubungan antara Diponegoro dan konsep Ratu Adil tampil lebih eksplisit melalui pemberian gelar Erucokro. Dalam tradisi ramalan Jayabaya, sosok Herucakra tidak lain adalah Ratu Adil itu sendiri, figur yang kehadirannya dinanti sebagai solusi atas situasi sulit yang tengah dihadapi. Dalam catatan sejarah Perang Jawa, Diponegoro tercatat menyandang gelar Sultan Ngabdulkamid Erucakra, dilengkapi dengan sejumlah gelar keagamaan tambahan, yakni Kabirul Mukminin, Sayidina, Panatagama Jawa, dan Khalifat Rasulullah. Jika gelar Erucakra berperan sebagai penanda kedudukannya sebagai Ratu Adil, maka bagian lain dari rangkaian gelar tersebut justru menegaskan posisinya sebagai pemimpin agama sekaligus khalifah di tanah Jawa (Fatkhan, 2020).

Penggunaan gelar tersebut juga muncul dalam konteks waktu yang memiliki makna khusus dalam penanggalan Jawa. Diponegoro mulai menyandang gelar Sultan Erucokro pada 1 Sura tahun Jawa Wawu, A.J. 1753 atau bertepatan dengan 15 Agustus 1825. Pemilihan waktu tersebut tidak terjadi secara kebetulan, sebab tahun Wawu

dipandang sebagai masa yang berkaitan dengan kemunculan Ratu Adil. Dalam Babad Keraton Surakarta, bulan Sura pada tahun Wawu bahkan disebut sebagai waktu yang paling tepat bagi Diponegoro untuk memproklamasikan dirinya sebagai Ratu Adil. Gelar Erucokro yang digunakan bersamaan dengan momentum tersebut semakin mempertegas hubungan antara identitas Diponegoro dan tokoh Ratu Adil yang telah dikenal dalam tradisi ramalan Jawa (Carey, 2017).

Kondisi masyarakat Jawa pada masa Perang Jawa pada akhirnya beradu dengan harapan yang telah lama tertanam terhadap sosok Ratu Adil. Harapan ini muncul tidak lepas dari kerusakan yang melanda tatanan sosial, ekonomi, dan politik, sehingga mendorong masyarakat menantikan pemimpin yang sanggup membawa perubahan. Perang Diponegoro sendiri menjadi ruang pertemuan antara harapan terhadap Ratu Adil dengan sejumlah elemen lain, seperti gagasan perang sabil, cerita wayang, dan kerinduan akan kembalinya tatanan lama yang dinilai lebih berkeadilan. Beragam unsur ini pada gilirannya membentuk identitas kolektif di kalangan pengikut Diponegoro, yang berasal dari latar belakang masyarakat yang beraneka ragam (Carey, 2011).

Diponegoro sebagai Pejuang dalam Narasi Perang Jawa dan Pemberontak dalam Perspektif Kolonial Belanda

Narasi Perang Jawa menonjolkan sosok Diponegoro sebagai pemimpin yang cakap mengorganisasi perlawanan sekaligus menggerakkan beragam kelompok masyarakat Jawa, sebuah kapasitas yang tidak semata bersumber dari posisinya sebagai bangsawan Yogyakarta, melainkan juga dari kepiawaiannya mengomandoi pasukan menghadapi kekuatan kolonial. Pemanfaatan kondisi geografis dan penerapan pola serangan yang sulit dibaca menjadi kunci strategi yang membuat pasukan Belanda kewalahan menghadapi pergerakan laskar Diponegoro. Goa Selarong berperan sebagai salah satu basis pertahanan, sementara taktik perang gerilya memberi keleluasaan bagi pasukannya untuk melancarkan serangan kilat dan segera berpindah sebelum pihak Belanda sempat melakukan serangan balasan (Wibowo dkk., 2023).

Keterlibatan berbagai kelompok masyarakat dalam Perang Jawa, mulai dari kalangan bangsawan, masyarakat pedesaan, para demang, hingga kelompok keagamaan, menjadi salah satu faktor yang memperkuat kemampuan Diponegoro tersebut. Pengaruh Diponegoro yang cukup luas ketika perlawanan dimulai tidak lepas dari relasi yang telah ia bangun dengan masyarakat jauh sebelum perang pecah.

Kedekatannya dengan petani dan kalangan bawah, ditambah hubungan erat dengan para kiai dan ulama, menjadi salah satu fondasi yang memungkinkan dukungan luas terhadap gerakannya terbentuk (Nukman & Ayundasari, 2021).

Mobilisasi tersebut kemudian berkembang melalui jaringan komunitas Islam. Kiai Mojo menjadi salah satu tokoh penting dalam lingkaran perjuangan Diponegoro, sementara para santri berperan menyebarkan seruan perjuangan kepada masyarakat di berbagai daerah. Dukungan dari kalangan kiai, ulama, santri, dan petani memberikan Diponegoro basis sosial yang lebih luas untuk mempertahankan perang. Jaringan tersebut juga turut membantu penyebaran gagasan perjuangan hingga ke berbagai wilayah Jawa, sehingga perlawanan tidak berhenti sebagai konflik yang terbatas pada lingkungan keraton (Nukman & Ayundasari, 2021).

Melalui Babad Diponegoro, gambaran tentang sosok Diponegoro sebagai pemimpin perjuangan dapat ditelaah lebih mendalam, terlebih sumber ini menempati posisi istimewa karena lahir langsung dari dikte atau tulisan Diponegoro sendiri selama masa pembuangannya di Manado pada 1831-1832. Narasinya tidak berhenti pada perekaman jalannya perang semata, melainkan turut merangkum pengalaman dan cara pendang Diponegoro terhadap berbagai peristiwa yang membawanya pada peperangan tersebut. Berangkat dari sudut pandang personal semacam ini, Babad Diponegoro mengungkap bagaimana dirinya beserta perjuangannya dimaknai dalam rangkaian pengalaman hidup yang ia lalui sendiri.

Citra Diponegoro sebagai tokoh yang berani dan gigih menghadapi kekuasaan kolonial kemudian tumbuh dan berkembang dalam historiografi Indonesia. Kemunculan perbedaan citra ini tidak lepas dari perbedaan cara pandang yang digunakan dalam menafsirkan sumber sejarah. Sumber yang sama, ternyata, bisa saja melahirkan cerita yang berbeda tergantung kerangka historiografi yang dipakai untuk membacanya. Fenomena ini tampak jelas dalam historiografi kolonial, di mana tokoh yang dianggap pahlawan oleh masyarakat Indonesia justru diposisikan sebagai pemberontak, akibat penulisan yang berangkat dari kepentingan kolonial (Darmawan & Winarti, 2018).

Kenangan masyarakat Indonesia terhadap Diponegoro sebagai pejuang terus bertahan hingga kini, tercermin dari statusnya sebagai salah satu pahlawan nasional yang diajarkan melalui pelajaran sejarah nasional. Tidak hanya itu, namanya juga diabadikan dalam berbagai nama jalan, gedung, lembaga pemerintahan sipil maupun militer, hingga kesatuan komando wilayah TNI. Bahkan, pengenalan terhadap sosoknya sudah dimulai

sejak bangku pendidikan dasar. Hal ini membuat citra kepahlawanan Diponegoro tetap bertahan, baik dalam ranah pendidikan maupun dalam berbagai simbol kehidupan berbangsa (Budhisantoso, 2014).

Berbeda dengan narasi sebelumnya, sumber kolonial Belanda menempatkan Diponegoro dalam kategori yang berlawanan. *De Java Oorlog* berkali-kali menggunakan istilah *hoofdmuiteling* atau "pemberontak utama" untuk menyebut Diponegoro. Pada bagian yang membahas awal perang, Diponegoro disebut sebagai *hoofdmuiteling* Dipo Negoro dan tindakannya dimasukkan ke dalam kerangka *opstand* atau pemberontakan. Penyebutan ini menunjukkan bahwa sumber kolonial tidak menggunakan istilah yang netral dalam menggambarkan posisi Diponegoro, melainkan menempatkannya dalam kategori politik sebagai pihak yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial (De Klerck, 1905).

Cara sumber kolonial melabeli pengikut Diponegoro pun tak jauh berbeda. Istilah *muitelingen*, yang berarti para pemberontak, melekat pada mereka, demikian pula sebutan *vijand* atau musuh yang beberapa kali digunakan. Dalam berbagai laporan pertempuran, pasukan Diponegoro senantiasa digambarkan sebagai pihak yang harus diserang, dipukul mundur, atau dikejar oleh tentara Belanda. Menariknya, sekalipun pasukan ini mampu menunjukkan perlawanan yang terorganisasi, narasi kolonial tetap menempatkan mereka sebagai kelompok pemberontak (De Klerck, 1905).

Label "pemberontak" rupanya tidak berhenti pada sosok Diponegoro semata, melainkan turut digunakan sumber kolonial untuk menyebur struktur kepemimpinan gerakan tersebut secara keseluruhan. Diponegoro, Mangkoeboemi, Kiai Mojo, dan Sentot disebut bersama-sama sebagai "empat pemimpin utama pemberontakan". Hal ini mengindikasikan bahwa sumber kolonial memperluas kategori pemberontak, tidak hanya kepada Diponegoro secara pribadi, tetapi juga kepada seluruh jaringan kepemimpinan dan pasukan dibawahnya sebagai bagian dari *opstand* (De Klerck, 1905).

Pandangan tersebut kemudian dipertegas dalam kajian yang membahas konstruksi propaganda kolonial. Kontruksi negatif terhadap Diponegoro tidak hanya hadir melalui istilah *muiteling*, tetapi juga melalui narasi yang menggambarkannya sebagai tokoh yang berambisi meraih kekuasaan di Jawa. Dalam teks kolonial seperti *Hikajat Tanah Hindia*, Diponegoro digambarkan sebagai pelaku pemberontakan yang digerakkan oleh kepentingan pribadi. Konstruksi semacam ini memperlihatkan bahwa penempatan Diponegoro sebagai "pemberontak" bukan semata persoalan pemilihan

istilah, melainkan bagian dari produksi narasi kolonial tentang siapa yang dianggap sah dan siapa yang dianggap sebagai lawan kekuasaan (Firmantoro dkk., 2018).

Hal yang patut dicermati, pelabelan Diponegoro sebagai pemberontak tidak membuat sumber kolonial menutup mata terhadap kemampuan militernya. Dalam berbagai laporan, pasukan di bawah pengaruh Diponegoro tetap diperlakukan sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan oleh tentara Belanda. Pasukan tersebut mampu melancarkan serangan, mempertahankan posisi, berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain, dan memberikan perlawanan yang cukup kuat sehingga pasukan kolonial harus dikerahkan berulang kali. Sumber yang sama bahkan menyebut Diponegoro dan sejumlah tokoh lain sebagai pemimpin utama dalam perang, meskipun gerakan tersebut secara keseluruhan tetap disebut *opstand* dan para pengikutnya *muitelingen* (De Klerck, 1905).

Perbedaan penyebutan tersebut menunjukkan adanya dua konstruksi terhadap satu tokoh yang sama. Dalam narasi yang berkembang di Indonesia, Diponegoro diposisikan sebagai pejuang yang memimpin perlawanan terhadap kekuasaan kolonial dengan dukungan berbagai kelompok masyarakat. Di sisi lain, sumber kolonial Belanda memasukkan tindakan dan jaringan perlawanan yang dipimpinnya ke dalam kategori *opstand*, sementara Diponegoro sendiri disebut *hoofdmuiteling*. Perbedaan ini tidak sekedar menyangkut istilah, tetapi juga menunjukkan bahwa kedudukan Diponegoro dalam historiografi sangat bergantung pada sudut pandang yang dipakai untuk membaca Perang Jawa (Darmawan & Winarti, 2018).

Faktor Penyebab Munculnya Perbedaan Narasi

Perbedaan narasi tentang Pangeran Diponegoro yang telah tampak pada pembahasan sebelumnya tidak semata menyangkut cara penyebutan tokoh, melainkan juga posisi sumber dan kepentingan yang melatarbelakangi pembentukannya. Dalam sumber Jawa, Diponegoro dapat diposisikan sebagai Ratu Adil melalui gambaran dirinya sebagai pemimpin yang memiliki legitimasi spiritual, membela masyarakat dari ketidakadilan, dan memimpin perlawanan terhadap kekuasaan yang dianggap menyimpang. Di sisi lain, dalam sumber kolonial, perlawanan yang dipimpinnya lebih mudah dikategorikan sebagai gangguan terhadap kekuasaan dan ketertiban kolonial. Dalam perkembangan historiografi Indonesia selanjutnya, Diponegoro lebih sering ditampilkan sebagai pejuang dan pahlawan nasional. Perbedaan ini menunjukkan bahwa

satu tokoh sejarah dapat memperoleh makna yang berbeda ketika berada dalam lingkungan sosial, politik, dan historiografis yang berbeda.

Perbedaan narasi tersebut tidak lepas dari posisi para penulisnya. Sumber-sumber tentang Perang Jawa berasal dari lingkungan yang beragam. Babad Diponegoro lahir dari pengalaman Diponegoro dan lingkaran terdekatnya. Babad Kedung Kebo terkait dengan Cokronegoro. Selain keduanya, terdapat pula sejumlah babad dari lingkungan keraton Yogyakarta dan Surakarta. Tiap sumber ini muncul dari pengalam dan kedudukan yang berlainan dalam menghadapi konflik. Sebagai contoh, Babad Diponegoro disusun pada masa pengasingan di Manado (1831-1832), sehingga isinya sangat dekat dengan pengalaman pribadi, perjalanan hidup, dan renungan keagamaan sang pangeran. Babad Kedung Kebo justru berangkat dari posisi Cokronegoro, yang berdiri di pihak lawan pasukan Diponegoro. Karena kedudukan yang berbeda itu, peristiwa yang sama tidak selalu dituturkan dengan cara yang sama (Carey, 2017).

Perbedaan kedudukan tersebut juga menunjukkan bahwa keberpihakan pada salah satu pihak tidak selalu menghasilkan gambaran yang sepenuhnya hitam-putih. Babad Kedung Kebo, misalnya, tidak serta-merta meniadakan pengakuan terhadap kualitas spiritual Diponegoro. Keterlibatan Basah Pengalasan, yang sebelumnya berada dalam lingkungan Diponegoro dan kemudian terlibat dalam penyusunan Babad Kedung Kebo, menunjukkan adanya hubungan yang lebih rumit antara pengalaman pribadi, posisi politik, dan penulisan sejarah. Cokronegoro, yang berhadapan dengan Diponegoro, pun tetap mengakui kualitas spiritual dan kehidupan sederhana tokoh tersebut, meskipun berada dalam posisi politik yang berlawanan (Carey, 2017). Oleh sebab itu, perbedaan narasi tidak cukup dijelaskan hanya melalui identitas “pihak Diponegoro” dan “pihak Belanda”, melainkan juga perlu mempertimbangkan posisi sosial-politik setiap penulis serta pengalaman mereka terhadap konflik.

Sifat sumber juga ikut membentuk narasi yang dihasilkan. Babad Diponegoro dan Babad Kedung Kebo ditulis dalam bentuk sastra Jawa dan tidak semata-mata mencatat peristiwa politik atau militer. Keduanya memuat pengalaman keagamaan, simbol, pertanda, hubungan manusia dengan kekuatan adikodrati, serta penilaian moral terhadap tokoh dan peristiwa. Bentuk ini memungkinkan Diponegoro dipahami bukan hanya sebagai pemimpin militer, melainkan juga sebagai tokoh yang memiliki kedudukan moral dan spiritual. Sebaliknya, sumber kolonial yang lahir dalam lingkungan administrasi dan militer memiliki kebutuhan pencatatan yang berbeda.

Perlawanan terhadap pemerintah kolonial dipahami dalam kerangkan keamanan, pengendalian wilayah, dan operasi militer. Perbedaan fungsi dan lingkungan pembentukan sumber ini turut menentukan hal-hal yang dianggap penting untuk dicatat serta cara tindakan Diponegoro dimaknai.

Fungsi narasi turut memperlihatkan adanya perbedaan kepentingan. Citra Diponegoro sebagai Ratu Adil ternyata tidak berhenti pada penggambaran watak seorang tokoh. Citra itu menjadi dasar legitimasi bagi kepemimpinannya ketika masyarakat berada dalam situasi politik dan sosial yang tidak menentu. Legitimasi tersebut, sebagaimana diuraikan sebelumnya, terbentuk dari keterkaitan Diponegoro dengan nilai keagamaan, keadilan, penderitaan rakyat, dan harapan terhadap pemimpin yang sanggup memulihkan keteraturan. Dengan demikian, narasi ini bukan hanya menjawab pertanyaan tentang siapa Diponegoro. Ia juga menjelaskan secara moral dan spiritual mengapa sebagian pengikut dapat menerima kepemimpinan dan perlawanannya. Menariknya, potret Diponegoro sebagai sosok yang bersahaja, religius, dan memihak rakyat juga hadir dalam sumber yang ditulis oleh pihak lawannya (Budhisantoso, 2014).

Label pemberontak yang dilekatkan kepada Diponegoro di lingkungan kolonial tidak lepas dari upaya mempertahankan posisi kekuasaan. Perlawanan yang menyasar pemerintahan berkuasa mudah dibaca sebagai ancaman bagi ketertiban dan legitimasi pemerintahan tersebut. Karena itu, istilah dan gambaran tentang pemberontakan bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Keduanya bergantung pada cara pemegang kekuasaan memaknai sebuah perlawanan. Pola yang sama berlaku dalam historiografi secara lebih luas, ketika kepentingan politik turut membentuk penulisan sejarah dan ingatan kolektif. Narasi sejarah pun senantiasa berkaitan dengan konteks kekuasaan di baliknya (Kurniawan dkk., 2019).

Pergeseran makna Diponegoro semakin tampak ketika konteks penulisan berpindah ke masa Indonesia pasca kemerdekaan. Pada masa ini, Diponegoro tidak lagi diposisikan terutama sebagai penentang pemerintah kolonial, melainkan sebagai bagian dari ingatan perjuangan bangsa. Kepahlawanannya kemudian berfungsi secara berbeda karena dapat dimanfaatkan untuk membangun figur pemersatu dalam masyarakat Indonesia yang plural. Penetapan pahlawan nasional diposisikan sebagai salah satu simbol integratif, sedangkan Diponegoro dipahami tidak hanya lewat perjuangan bersenjatanya, tetapi juga melalui nilai keadilan, nasionalisme, keagamaan, dan kepentingan masyarakat (Budhisantoso, 2014).

Unsur-unsur pembentuk citra Diponegoro dalam sumber Jawa ternyata dapat dimaknai secara baru ketika masuk ke dalam historiografi nasional. Kesalehan, kesederhanaan, keberpihakan pada rakyat, serta perlawanan terhadap kekuasaan kolonial semula berperan sebagai landasan legitimasi bagi kepemimpinan atau perlawanan. Dalam konteks yang baru, semua sifat itu dibaca sebagai bagian dari watak seorang pahlawan. Budhisantoso sendiri mengaitkan kepahlawanan Diponegoro dengan pendidikan dan pembentukan karakter bangsa. Akibatnya, fokus pembicaraan tidak lagi berhenti pada peristiwa Perang Jawa, tetapi bergeser ke nilai yang dapat diteruskan kepada generasi selanjutnya (Budhisantoso, 2014).

Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa narasi tentang Diponegoro turut berubah mengikuti kebutuhan masyarakat pada tiap periode. Pada masa Perang Jawa, narasi Ratu Adil berhubungan dengan upaya mencari legitimasi kepemimpinan dan harapan akan pulihnya keadilan. Dalam konteks kolonial, perlawanan yang sama dilihat dari sudut pandang penguasa yang harus menjaga ketertiban dan menghadapi ancaman terhadap pemerintahannya. Setelah kemerdekaan, pengalaman perlawanan itu mendapat tempat dalam pembentukan ingatan nasional dan melahirkan penekanan yang lebih kuat pada aspek kepahlawanan. Historiografi Indonesia pasca kemerdekaan memang berkembang melalui usaha mengganti sudut pandang kolonial dengan sudut pandang Indonesia-sentris, termasuk perubahan dalam cara memposisikan tokoh-tokoh yang sebelumnya digambarkan dalam historiografi kolonial (Rofiq, 2017).

KESIMPULAN

Konstruksi Diponegoro sebagai Ratu Adil dalam sumber Jawa terbentuk melalui perpaduan antara tradisi kepemimpinan Jawa, nilai-nilai Islam, dan keyakinan terhadap legitimasi spiritual seorang pemimpin. Diponegoro tidak hanya ditempatkan sebagai tokoh politik, tetapi juga sebagai figur yang memiliki kedudukan moral dan religius serta diharapkan mampu memulihkan tatanan yang dianggap mengalami krisis. Konstruksi tersebut memberikan dasar legitimasi bagi kepemimpinan dan perjuangan Diponegoro dalam Perang Jawa.

Narasi mengenai Diponegoro sebagai pejuang dan pemberontak muncul dari perspektif yang berbeda terhadap Perang Jawa. Dalam narasi perjuangan Indonesia, Diponegoro dipahami sebagai pejuang yang memimpin perlawanan terhadap kekuasaan kolonial dan memperoleh dukungan dari berbagai kelompok masyarakat. Sementara itu,

sumber kolonial Belanda menempatkan perlawanan tersebut sebagai pemberontakan dan Diponegoro sebagai pemberontak karena peristiwa tersebut dipahami dari sudut pandang kekuasaan kolonial. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa satu peristiwa dapat menghasilkan pemaknaan yang berbeda ketika ditempatkan dalam kerangka historiografi yang berbeda.

Perbedaan narasi tentang Diponegoro dipengaruhi oleh posisi penulis, karakter sumber, kepentingan, serta konteks histori ketika narasi tersebut diproduksi. Sumber Jawa, historiografi kolonial, dan historiografi Indonesia setelah kemerdekaan memiliki latar dan tujuan penulisan yang berbeda sehingga menghasilkan penekanan yang berbeda pula terhadap sosok Diponegoro. Karena itu, penyebutan Diponegoro sebagai Ratu Adil, pejuang, maupun pemberontak tidak berdiri sebagai kategori yang terlepas dari konteks, tetapi terbentuk melalui perspektif historiografis yang memberikan makna terhadap tokoh dan peristiwa Perang Jawa.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, N. 02121099 D. E. (2009). *Pengaruh Mitos Ratu Adil dalam Perang Jawa (1825-1830)* [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/2809/

Baso, A. (2016). Akar Pendidikan Kewarganegaraan di Pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam*, *27*(2), 161–186. https://doi.org/10.15575/jpi.v27i2.503

Budhisantoso, S. (2014). *Pangeran Diponegoro: Pahlawan Nasional*.

Carey. (2017). *Sisi Lain Diponegoro Babad Kedung Kebo dan Historiografi Perang Jawa*.

Carey, P. (2011). *Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785-1855*.

Claria, D. A. K. (2026). Representasi Ideologi dalam Babad Diponegoro: Analisis Linguistik Sistemik Fungsional. *Prosiding Seminar Nasional Bahasa Ibu*, *3*(1), 517–526.

Darmawan, W., & Winarti, M. (2018). *Perjuangan Pangeran Diponegoro: Beberapa Catatan tentang Pengembangan Karakter Budaya Bangsa*.

De Klerck. (1905). *De Java-oorlog van 1825-30*.

Fatkhan, M. (2020). Sosok Ratu Adil dalam Ramalan Jayabaya. *Refleksi Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam*, *19*, 241–252. https://doi.org/10.14421/ref.v19i2.2263

Firmantoro, V., Sujoko, A., & Antoni, A. (2018). Komunikasi Diponegoro dan Post-Truth Era Propaganda Klasik Jawa. *Jurnal Nomosleca*, *4*(1). https://doi.org/10.26905/nomosleca.v4i1.1974

Hajar, I. I., Hawari, M. H., & Rabbani, M. S. (2026). *Dari Narasi ke Analisis: Peran Pendekatan dan Teori dalam Penelitian Sejarah*.

Hall. (1997). *Hall and Open University—1997—Representation cultural representations and signifying practices*.

Kurniawan, G. F., Warto, W., & Sutimin, L. A. (2019). Dominasi Orang-Orang Besar Dalam Sejarah Indonesia: Kritik Politik Historiografi dan Politik Ingatan. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, *4*(1), 36. https://doi.org/10.14710/jscl.v4i1.21576

Nafida, N. N. (2026). *Representasi identitas, politik, dan keagamaan pangeran diponegoro dalam karya Peter Carey kuasa ramalan: Pangeran Diponegoro dan akhir tatanan lama di jawa 1785-1855* [Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya]. https://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/93269/

Novitri, S. (2025). *Perang Jawa 1825-1830: Peran Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa serta Dampak Stabilitas Sosial-Ekonomi Masyarakat Jawa dan Kolonialisme Belanda*.

Nukman, N., & Ayundasari, L. (2021). Strategi Diponegoro dalam menggerakkan semangat jihad masyarakat Islam di Jawa. *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, *1*(3), 368–378. https://doi.org/10.17977/um063v1i3p368-378

Pradipta, D. W. (1981). *Babad Diponagoro: Alih Aksara dan Ringkasan terjemahan*.

Rofiq, A. C. (2017). *The Journal Of History And Islamic Civilization*.

White, H. V. (2000). *Metahistory: The historical imagination in nineteenth-century Europe* (paperback ed., 11. [print.]). Johns Hopkins Univ. Press.

Wibowo, C., Sudiarso, A., & Prihantoro, K. (2023). *Analisis Kepemimpinan Pangeran Diponegoro pada Perang Jawa Dalam Menegakkan Kedaulatan Kesultanan Yogyakarta (Ditinjau Dari Teori Seni Perang Sun-Tzu)*. *7*(1).

Wijaya, T., Alauwiyah, F., & Kurohman, M. T. (2025). From King to People: Jayabaya's Prophecy and Its Evolution in Javanese Political Culture. *Jurnal Ceteris Paribus*, *4*(2), 22–37. https://doi.org/10.25077/jcp.v4i2.50